

PENGARUH KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Sylvia Febriany Gerungan
David P.E. Saerang
Winston Pontoh

sylviagerungan@gmail.com

ABSTRACT

The regional autonomy policy gives more chance to local government for managing their own financial. To determine the success of local government in managing their own financial, Financial Performance Analysis can be used. The objective of this research is to determine the influence of regional financial performance toward the capital expenditure allocation in forward years of regency/city of North Sulawesi. The data analysis method used in this research is regression. The results show that, simultaneously, the Regional Financial Independence ratio, Regional Financial Dependence ratio, Local Original Revenue Effectiveness ratio, Capital Expenditure Effectiveness ratio, Efficiency ratio, and Expenditure Harmony ratio significantly effect the Capital Expenditure Allocation. Partially, the Regional Financial Independence ratio and Efficiency ratio, significantly, have a negative effect toward the Capital Expenditure Allocation. While, the Local Original Revenue Effectiveness ratio and Expenditure Harmony ratio have a positive effect toward the Capital Expenditure Allocation. The Regional Financial Dependence ratio and Capital Expenditure Effectiveness have no significant effect toward the Capital Expenditure Allocation.

Keywords: Financial Performance, Regional Financial Independence, Regional Financial Dependence, Effectiveness, Efficiency, Expenditure Harmony, Capital Expenditure.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, kewenangan pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam mengelola sumber daya dan keuangan daerahnya sendiri. Berkurangnya campur tangan pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat diukur dengan analisis kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan terdiri dari rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan ini digunakan untuk: menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah; mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2007:230).

Seperti halnya rasio-rasio pada perusahaan swasta, rasio-rasio keuangan daerah merupakan perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, dikarenakan adanya perbedaan jenis dan struktur laporan keuangan pemerintah daerah dengan perusahaan swasta, maka rasio-rasio keuangan daerah memiliki sedikit perbedaan. Rasio-rasio yang lazim digunakan dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, merupakan perbandingan angka-angka dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rasio-rasio yang sering digunakan dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Belanja Dan Rasio Pertumbuhan.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara secara umum berada di atas rata-rata. Pendapatan pemerintah daerah Sulawesi Utara terus meningkat, namun sebagian besar pendapatan tersebut merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Komposisi belanja pemerintah daerah secara umum mengalami perbaikan di mana porsi belanja modal terus meningkat, namun komposisi belanja terbesar masih didominasi oleh belanja pegawai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota di Sulawesi Utara relatif rendah dan ketergantungan pendapatan akan transfer pemerintah pusat semakin besar. Hal ini kurang selaras dengan tujuan otonomi daerah. Pemerintah provinsi dan kebanyakan kabupaten dan kota di Sulawesi Utara memiliki SiLPA yang besar. Ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah kurang dapat menyerap anggaran yang ada dan masih bisa melakukan program dan kegiatan yang penting dalam pelayanan kepada masyarakat (Bank Dunia, 2011).

Belanja modal merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Untuk mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu memberikan porsi yang lebih besar pada belanja modal dalam komposisi belanja daerah. Belanja modal yang disebut juga belanja pembangunan, mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Priyo Hari Adi (2006) pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi daya tarik bagi para investor. Hal ini dapat memberikan peluang pada peningkatan pendapatan per-kapita daerah dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar alokasi belanja modal berarti pemerintah semakin serius dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Namun saat ini komposisi belanja masih didominasi oleh belanja operasional terutama belanja pegawai. Pada kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Utara porsi belanja modal masih tergolong kecil dibandingkan dengan belanja operasional. Rasio belanja modal terhadap total belanja tahun 2011 rata-rata untuk semua kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara adalah 27,69%, dan rasio belanja modal terbesar ada di kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu sebesar 49,16%.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten dan kota provinsi Sulawesi Utara. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Belanja Modal, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Dan Rasio Keserasian Belanja. Beberapa variabel telah digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, seperti Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi. Sedangkan beberapa variabel ditambahkan untuk memperluas referensi tentang rasio-rasio yang memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal. Rasio Efektivitas Belanja Modal ditambahkan, untuk melihat apakah semakin efektif penyerapan anggaran belanja modal akan mempengaruhi penetapan anggaran belanja modal tahun berikutnya. Rasio Keserasian belanja ditambahkan untuk melihat apakah pengalokasian belanja modal dipengaruhi oleh tren belanja modal di tahun-tahun sebelumnya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diformulasikan beberapa masalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Apakah Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal?
- 2) Apakah Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal?
- 3) Apakah Efektivitas PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal?
- 4) Apakah Efektivitas Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal?
- 5) Apakah Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal?
- 6) Apakah Keserasian Belanja berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal?

- 7) Apakah Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efektivitas Belanja Modal, Efisiensi, dan Keserasian Belanja berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris bahwa:

- 1) Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
- 2) Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
- 3) Efektivitas PAD berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
- 4) Efektivitas Belanja Modal berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
- 5) Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
- 6) Keserasian Belanja berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
- 7) Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efektivitas Belanja Modal, Efisiensi Keuangan Daerah, Keserasian Belanja berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

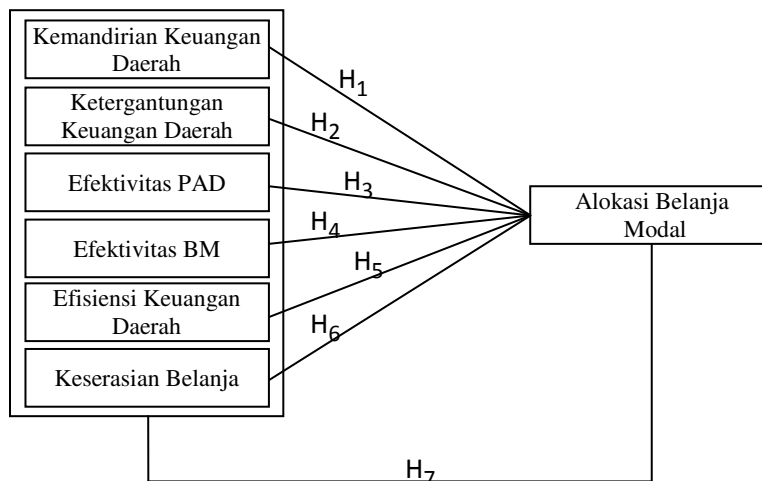
- 1) Bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal peningkatan kinerja keuangan daerah dan dalam hal pengalokasian belanja modal.
- 2) Dapat menambah literatur bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi terkait atau penelitian selanjutnya.

1.5. Tinjauan Pustaka

Ardhini dan Handayani (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: kemandirian daerah, efektivitas keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, dan Silpa. Sedangkan Variabel dependennya adalah belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Dari pengujian yang dilakukan dengan analisis regresi berganda diperoleh hasil yang menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif tidak signifikan terhadap rasio belanja modal untuk pelayanan publik. Sedangkan rasio efektivitas dan SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan public. Rasio Efisiensi berpengaruh negatif namun signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan public.

Penelitian yang dilakukan Sularso dan Restianto (2011) pada kabupaten/kota di Jawa Tengah bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM), dengan sampel seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dipengaruhi oleh kinerja keuangan khususnya rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD. Sebaliknya rasio derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Lebih lanjut alokasi belanja modal memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa salah satu fungsi anggaran pemerintah daerah yakni sebagai stimulus perekonomian telah berjalan. Hasil analisis mengindikasikan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung adalah kinerja keuangan daerah. Pengaruh tidak langsung terbesar adalah efektivitas PAD. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dengan otonomi daerah, muncul indikator lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu kinerja keuangan daerah.

1.6. Kerangka Konseptual



1.7. Hipotesis

- H1 : Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
- H2 : Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
- H3 : Efektivitas PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
- H4 : Efektivitas Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
- H5 : Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
- H6 : Keserasian Belanja berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal
- H7 : Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efektivitas Belanja Modal, Efisiensi Keuangan Daerah dan Keserasian Belanja berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal

LANDASAN TEORI

2.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kemampuan pemda dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Pemda sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemda berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007:230).

Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolok ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah:

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemda, bersedia memberikan pinjaman ataupun membeli obligasi.

Menurut Mahmudi (2011:169) beberapa rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah, terdiri dari: Derajat Desetrasalisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Efektivitas Pajak, Rasio Efisiensi Pajak, Derajat Kontribusi BUMD. Selain itu terdapat juga rasio aktivitas untuk organisasi pemerintah yang berupa Rasio Keserasian Belanja.

2.2.1. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2011:170).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{(\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi}) + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

2.2.2. Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2.2.3. Efektivitas

Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Sangat efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89%
Tidak efektif	< 75%

Rasio ini juga dapat digunakan untuk melihat efektivitas belanja, yaitu dengan membandingkan realisasi belanja dan target belanja.

2.2.4. Efisiensi

Rasio efisiensi pendapatan dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Rasio efisiensi pendapatan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Secara umum, nilai rasio efisiensi pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Sangat efisien	< 60%
Efisien	60% - 80%
Cukup efisien	80% - 90%
Kurang efisien	90% - 100%
Tidak efisien	< 100%

2.2.5. Keserasian Belanja

Rasio Keserasian Belanja menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada tolok ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Halim, 2007:235).

2.2.6. Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n : Data yang dihitung pada tahun ke-n

P_o : Data yang dihitung pada tahun ke-o

r : Pertumbuhan

2.2. Belanja Modal

Menurut Warren (2008:450), Belanja Modal adalah biaya akuisisi atas aset tetap, biaya atas penambahan atau perbaikan pada aset tetap sendiri yang meningkatkan nilai total aset, atau memperpanjang umur manfaatnya. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa mafaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk

digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria berikut:

1. Berwujud
2. Mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data-data pada laporan realisasi anggaran dan APBD. Berdasarkan sumbernya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Provinsi Sulawesi Utara, dan dari situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Utara diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Provinsi Sulawesi Utara, dan dari situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara yang berjumlah 15. Sampel dari penelitian ini adalah data *time series* LKPD yang berupa APBD dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

Sampel Penelitian

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel	Sampel data ekstrim	Sampel yang digunakan
1	Kab. Bolaang Mongondow	5	1	4
2	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3	-	3
3	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3	-	3
4	Kab. Bolaang Mongondow Utara	4	-	4
5	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	4	-	4
6	Kab. Kep. Talaud	5	-	5
7	Kab. Minahasa	5	-	5

8	Kab. Minahasa Selatan	5	-	5
9	Kab. Minahasa Tenggara	4	-	4
10	Kab. Minahasa Utara	5	-	5
11	Kab. Sangihe	5	1	4
12	Kota Bitung	5	-	5
13	Kota Kotamobagu	4	-	4
14	Kota Manado	5	-	5
15	Kota Tomohon	5	-	5
Total Sampel		67	2	65

Dalam pengujian asumsi klasik khususnya uji normalitas, ditemukan 2 sampel yang memiliki data ekstrim, yaitu data yang memiliki nilai terlampaui besar dibandingkan dengan data yang lain dalam kelompok variabel yang sama. Kedua sampel ini dieliminasi karena dapat menyebabkan data tidak terdistribusi normal. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini semula berjumlah 67 sampel, setelah dilakukan eliminasi 2 sampel yang memiliki data ekstrim, jumlah sampel yang digunakan menjadi 65 sampel.

3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Keuangan Daerah (X_1), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara PAD dengan Transfer Pusat/Provinsi dan Pinjaman, dinyatakan dalam skala rasio.
2. Ketergantungan Keuangan Daerah (X_2), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara Pendapatan Transfer dengan Total Pendapatan Daerah, dinyatakan dalam skala rasio.
3. Efektivitas PAD (X_3), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara Realisasi Penerimaan PAD dengan Anggaran PAD, dinyatakan dalam skala rasio.
4. Efektivitas Belanja Modal (X_4), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara Realisasi Belanja Modal dengan Anggaran Belanja Modal, dinyatakan dalam skala rasio.
5. Efisiensi Keuangan Daerah (X_5), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara Realisasi Total Belanja dengan Realisasi Total Pendapatan, dinyatakan dalam skala rasio.
6. Keserasian Belanja (X_6), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara Realisasi Belanja Modal dengan Realisasi Total Belanja, dinyatakan dalam skala rasio.
7. Alokasi Belanja Modal (Y), variabel ini adalah variabel dependen yang merupakan perbandingan antara Anggaran Belanja Modal dengan Anggaran Total Belanja, dinyatakan dalam skala rasio. Alokasi Belanja Modal yang digunakan dalam penelitian ini adalah data belanja modal pada APBD di tahun berikutnya.

3.5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana dan regresi linier berganda. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus analisis regresi berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6$$

Y : Alokasi Belanja Modal

X_1 : Kemandirian Keuangan Daerah

X_2 : Ketergantungan Keuangan Daerah

X_3 : Efektivitas PAD

X_4 : Efektivitas BM

- X₅ : Efisiensi Keuangan Daerah
 X₆ : Keserasian Belanja
 a : Konstanta
 b : Koefisien regresi

Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian normalitas, linearitas, homoskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi (Santoso, 2010:203).

a. Uji Normalitas

Alat uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi nilai residu dari regresi mempunyai distribusi yang normal. Jika distribusi dari nilai-nilai residual tersebut tidak dapat dianggap berdistribusi normal maka dikatakan ada masalah terhadap asumsi normalitas. Pengujian ini secara praktis dilakukan lewat pembuatan grafik normal probability plot.

b. Uji Homoskedastisitas

Alat uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka hal tersebut disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Alat uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar-variabel independen. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem Multikolinearitas (Multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi liner ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengujian Asumsi Klasik

4.2.1 Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antarvariabel independen. Uji Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Sebuah model regresi yang tidak terjadi multikolinieritas antarvariabel independennya ditandai dengan nilai *Tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Tabel 4.1. menunjukkan nilai *Tolerance* semua variabel independen berada di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas pada kelima variabel independen dalam penelitian ini. Pada Tabel 4.2. menunjukkan *Pari-wise correlation* antarvariabel independen semuanya di bawah 0,80 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antarvariabel independen.

Tabel 4.1. Uji Multikolinieritas 1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	35.194	22.349		1.575	.121		
	KmD	-.657	.317	-.236	-2.070	.043	.694	1.441
	KtgD	-.222	.162	-.143	-1.369	.176	.828	1.208
	Efektivitas	.026	.023	.132	1.159	.251	.700	1.429
	EfkBM	.075	.031	.261	2.420	.019	.775	1.290
	Efisiensi	-.087	.172	-.056	-.507	.614	.749	1.335
	KsB	.432	.110	.464	3.940	.000	.650	1.539

a. Dependent Variable: ABM

Sumber: Data Olahan

Tabel 4.2. Uji Multikolinieritas 2

Coefficient Correlations^a

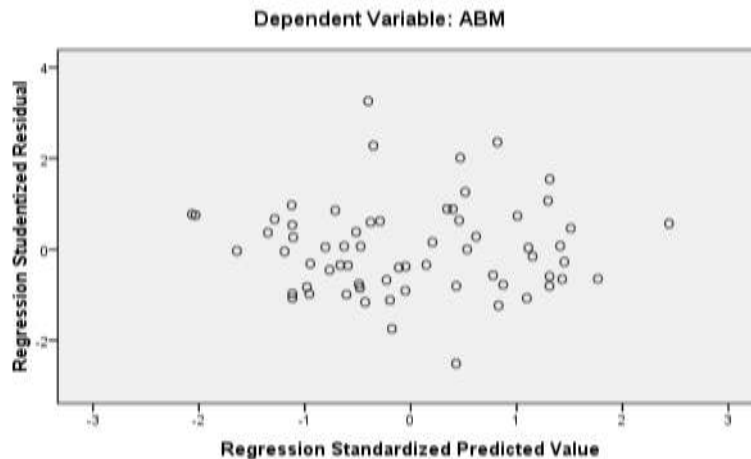
Model			KsB	Efisiensi	KtgD	EfkBM	Efektivitas	KmD
1	Correlations	KsB	1.000	-.098	.221	.050	-.476	.396
		Efisiensi	-.098	1.000	-.149	.398	.247	-.272
		KtgD	.221	-.149	1.000	-.125	-.140	.385
		EfkBM	.050	.398	-.125	1.000	.219	.017
		Efektivitas	-.476	.247	-.140	.219	1.000	-.187
		KmD	.396	-.272	.385	.017	-.187	1.000
	Covariances	KsB	.012	-.002	.004	.000	-.001	.014
		Efisiensi	-.002	.029	-.004	.002	.001	-.015
		KtgD	.004	-.004	.026	.000	.000	.020
		EfkBM	.000	.002	.000	.001	.000	.000
		Efektivitas	-.001	.001	.000	.000	.001	-.001
	KmD	.014	-.015	.020	.000	-.001	.101	

a. Dependent Variable: ABM

4.2.2 Sumber: Data Olahan

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Scatterplot* dan uji Glejser. Grafik *Scatterplot* menunjukkan titik-titik tidak menyebar secara acak, sehingga dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Namun, metode grafik memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah observasi mempengaruhi hasil plotting. Untuk itu pengujian dilanjutkan dengan menggunakan metode statistik yaitu uji Glesjer.

Gambar 4.1. Grafik Scatterplot



Sumber: Data Olahan

Uji Glesjer dilakukan dengan meregresikan nilai absolute residual ($AbsU_i$) terhadap variabel independen. Jika hasilnya signifikan, maka mengindikasikan terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi (Jenie, 2012:26).

Tabel 4.3. Uji GlesjerCoefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.225	13.294		2.725	.008
	KmD	-.322	.189	-.253	-1.709	.093
	KtgD	-.144	.096	-.203	-1.495	.140
	Efektivitas	-.008	.013	-.087	-.587	.559
	EfkBM	-.018	.018	-.139	-.992	.325
	Efisiensi	-.128	.102	-.179	-1.255	.214
	KsB	-.049	.065	-.115	-.754	.454

a. Dependent Variable: Ahselij

Sumber: Data Olahan

Hasil uji Glesjer menunjukkan nilai signifikansi variabel independen berada di atas 0,01 yaitu sebesar 0,93; 0,140; 0,559; 0,325; 0,214 dan 0,454. Hal ini berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4.2.3 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat permasalahan autokorelasi. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam regresi linier berganda adalah Uji Durbin Watson (Janie, 2012:30). Suatu model regresi dinyatakan tidak terdapat permasalahan autokorelasi apabila:

$$d_u < d < 4 - d_u$$

Di mana:

d = nilai Durbin Watson hitung

d_u = nilai batas atas/ upper Durbin Watson tabel

Tabel 4.4. Uji Durbin WatsonModel Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.691 ^a	.477	.423	7.35600	1.876

a. Predictors: (Constant), KsB, Efisiensi, KtgD, EfikBM, EfikPAD, KmD

b. Dependent Variable: ABM

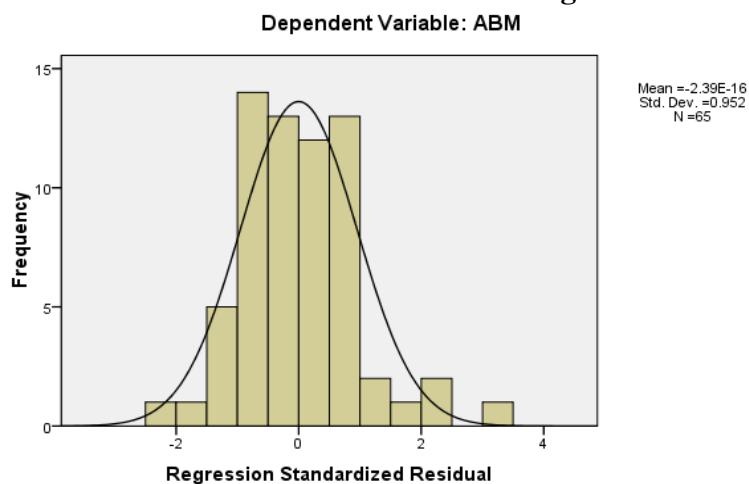
Sumber: Data Olahan

Hasil uji Durbin Watson adalah sebesar 1,876. Nilai ini lebih besar bila dibandingkan dengan batas bawah (d_l) tabel Durbin Watson yaitu sebesar 1,404 dan batas atas (d_u) sebesar 1,804. Karena $1,804 < 1,876 < 4 - 1,804$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi ini.

4.2.4 Normalitas

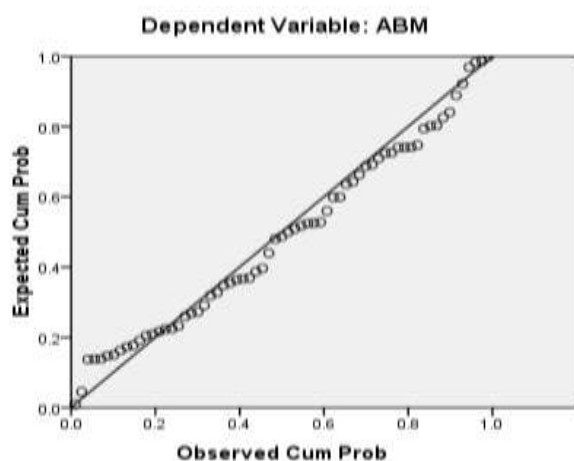
Grafik Histogram Uji Normalitas memberikan pola distribusi yang tidak normal. Sedangkan grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal.

Gambar 4.2. Grafik Histogram



Sumber: Data Olahan

Gambar 4.3. Grafik Normal Plot



Sumber: Data Olahan

Uji statistik juga perlu dilakukan untuk melengkapi pengujian dengan grafik histogram dan grafik normal plot. Uji statistik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji Kolmogorov Smirnov (KS).

Tabel 4.5. Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.00270149
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.073
	Negative	-.094
Kolmogorov-Smirnov Z		.761
Asymp. Sig. (2-tailed)		.609

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,761 dengan tingkat signifikansi jauh di atas 0,05 yaitu 0,609. Dengan kata lain bahwa nilai KS tidak signifikan, berarti residual terdistribusi secara normal.

4.3. Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji Parsial

Pengujian secara parsial dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Hasil Uji Parsial

Variabel Independen	Sig.	t-hit	Model Regresi	R	Kesimpulan
KmD	0,001	3,357	$ABM = 30,897 - 1,084 \text{ KmD}$	0,389	H1 Diterima
KtgD	0,609	0,515	$ABM = 36,316 - 0,100 \text{ KtgD}$	0,065	H2 Ditolak
EfkPAD	0,011	2,631	$ABM = 19,938 + 0,062 \text{ EfKPAD}$	0,315	H3 Diterima
EfkBM	0,105	2,137	$ABM = 65,998 - 0,407 \text{ EfKBM}$	0,260	H4 Ditolak
Efisiensi	0,036	2,137	$ABM = 65,998 - 0,407 \text{ Efisiensi}$	0,260	H5 Diterima
KsB	0,000	5,580	$ABM = 11,571 - 0,535 \text{ KsB}$	0,575	H6 Diterima

Sumber: Data Olahan

4.3.1.1 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik Variabel Kemandirian Keuangan Daerah memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan t-hitung 3,357 lebih besar dari t-tabel 1,998. Ini berarti Variabel Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Nilai t-hitung negatif menunjukkan bahwa Variabel Kemandirian Keuangan Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap Alokasi Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan variabel Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap Alokasi Belanja Modal. Model regresi dari pengaruh Variabel Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal adalah $Y = 30,897 - 1,084X$. Model regresi ini berarti jika Variabel Kemandirian Keuangan Daerah dianggap konstan maka Alokasi Belanja Modal adalah sebesar 30,897%. Jika variabel Kemandirian Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 1,084%. Nilai R sebesar 0,389 memiliki arti bahwa 38,90% Variabel Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan dengan variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan 61,10% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

4.3.1.2 Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik Variabel Ketergantungan Keuangan Daerah memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,609 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan nilai t-hitung sebesar 0,515 lebih kecil dari t-tabel 1,998. Ini berarti variabel Ketergantungan Keuangan Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Model regresi dari pengaruh Variabel Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal adalah $Y = 36,316 - 0,1X$. Model regresi ini berarti jika variabel Ketergantungan Keuangan Daerah dianggap konstan maka Alokasi Belanja Modal adalah sebesar 36,316%. Jika variabel Ketergantungan Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 0,1%. Nilai R sebesar 0,065 memiliki arti bahwa 6,5% variabel Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan dengan variabel Ketergantungan Keuangan Daerah, sedangkan 93,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

4.3.1.3 Pengaruh Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik Variabel Efektivitas PAD memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,011 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai t-hitung sebesar 2,631 lebih besar dari t-tabel 1,998. Ini

berarti variabel Efektivitas PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Nilai t-hitung positif menunjukkan bahwa variabel Efektivitas PAD memiliki pengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan variabel Efektivitas PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Model regresi dari pengaruh variabel Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal adalah $Y = 19,938 + 0,062X$. Model regresi ini berarti jika variabel Efektivitas PAD dianggap konstan maka Alokasi Belanja Modal adalah sebesar 19,938%. Jika variabel Efektivitas PAD mengalami kenaikan sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,062%. Nilai R sebesar 0,315 memiliki arti bahwa 31,5% Variabel Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan dengan variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan 68,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

4.3.1.4 Pengaruh Efektivitas Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik variabel Efektivitas Belanja Modal memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0.105 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dan nilai t-hitung sebesar 1,645 lebih kecil dari t-tabel 1,998. Ini berarti variabel Efektivitas Belanja Modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Model regresi dari pengaruh variabel Efektivitas Belanja Modal terhadap Alokasi Belanja Modal adalah $Y = 21,229 + 0,058X$. Model regresi ini berarti jika variabel Efektivitas Belanja Modal dianggap konstan maka Alokasi Belanja Modal adalah sebesar 21,229%. Jika variabel Efektivitas Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,058%. Nilai R sebesar 0,203 memiliki arti bahwa 20,3% variabel Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan dengan variabel Efektivitas Belanja Modal, sedangkan 79,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

4.3.1.5 Pengaruh Efisiensi terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik variabel Efisiensi memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai t-hitung sebesar 2,137 lebih besar dari t-tabel 1,998. Ini berarti variabel Efisiensi berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Nilai t-hitung negatif menunjukkan bahwa variabel Efisiensi memiliki pengaruh negatif terhadap Alokasi Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan variabel Efisiensi berpengaruh signifikan negatif terhadap Alokasi Belanja Modal. Model regresi dari pengaruh variabel Efisiensi terhadap Alokasi Belanja Modal adalah $Y = 65,998 - 0,407X$. Model regresi ini berarti jika variabel Efisiensi dianggap konstan maka Alokasi Belanja Modal adalah sebesar 65,998%. Jika variabel Efisiensi mengalami kenaikan sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 0,407%. Nilai R sebesar 0,260 memiliki arti bahwa 26% variabel Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan dengan variabel Efisiensi, sedangkan 74% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

4.3.1.6 Pengaruh Keserasian Belanja terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji statistik variabel Keserasian Belanja memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan nilai t-hitung sebesar 5.580 lebih besar dari t-tabel 1,998. Ini berarti variabel Keserasian Belanja berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Nilai t-hitung positif berarti variabel Keserasian Belanja memiliki pengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan variabel Keserasian Belanja berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Model regresi dari pengaruh variabel Keserasian Belanja terhadap Alokasi Belanja Modal adalah $Y = 11.571 + 0,535X$. Model regresi ini berarti jika variabel Keserasian Belanja dianggap konstan maka Alokasi Belanja Modal adalah sebesar 11,571%. Jika terjadi kenaikan variabel Keserasian Belanja mengalami kenaikan sebesar 1% maka Alokasi Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,535%. Nilai R sebesar 0,575 memiliki arti bahwa 57,5% Variabel Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan dengan variabel Keserasian Belanja, sedangkan 42,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

4.3.2 Uji Simultan

4.3.2.1 Koefisien Determinasi

Tabel 4.7. Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.691 ^a	.477	.423	7.35600

a. Predictors: (Constant), EfKBM, KtgD, KsB, Efisiensi, Efektivitas, KmD

Sumber: Data Olahan

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,423 yang artinya 42,30% variabel Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel independen Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efektivitas Belanja Modal, Efisiensi dan Keserasian Belanja. Sedangkan sisanya sebesar 57,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

4.3.2.2 Uji F

Berdasarkan Tabel 4.8. nilai F hitung sebesar 8,814 sedangkan F tabel sebesar 2,2596. Karena F hitung > F tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Probabilitas pada tabel ANOVA menunjukkan nilai 0,000 yang jauh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8. Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2861.528	6	476.921	8.814	.000 ^a
	Residual	3138.421	58	54.111		
	Total	5999.949	64			

a. Predictors: (Constant), KsB, Efisiensi, KtgD, EfKBM, Efektivitas, KmD

b. Dependent Variable: ABM

Sumber: Data Olahan

4.3.3 Uji t

Tabel 4.9. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	35.194	22.349		1.575	.121
	KmD	-.657	.317	-.236	-2.070	.043
	KtgD	-.222	.162	-.143	-1.369	.176
	Efektivitas	.026	.023	.132	1.159	.251
	EfKBM	.075	.031	.261	2.420	.019
	Efisiensi	-.087	.172	-.056	-.507	.614
	KsB	.432	.110	.464	3.940	.000

a. Dependent Variable: ABM

Sumber: Data Olahan

Hasil uji t menunjukkan terdapat 3 (tiga) variabel independen yang memiliki probabilitas signifikansi dibawah $\alpha = 0,05$ yaitu Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,043; Efektivitas Belanja Modal sebesar 0,019; dan Keserasian Belanja sebesar 0,000. Sedangkan 3 (tiga) variabel independen yang lain probabilitas signifikansinya berada di atas $\alpha = 0,05$ yaitu Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 0,176; Efektivitas PAD sebesar 0,251; dan Efisiensi sebesar 0,614. Ini berarti variabel Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Belanja Modal dan Keserasian Belanja berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Alokasi Belanja Modal, sedangkan variabel Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD dan Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Alokasi Belanja Modal. Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$\text{ABM} = 35,194 - 0,657 \text{ KmD} - 0,222 \text{ KtgD} + 0,026 \text{ Efektivitas PAD} + 0,075 \text{ EfkBM} - 0,087 \text{ Efisiensi} + 0,432 \text{ KsB}$$

Interpretasi dari persamaan di atas adalah:

1. Konstanta (a) sebesar 35,194 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka Alokasi Belanja Modal sebesar 35,194%
2. Koefisien KmD sebesar -0,657 menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan variabel Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 1%, maka Alokasi Belanja Modal akan turun sebesar 0,657% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
3. Koefisien KtgD sebesar -0,222 menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan variabel Ketergantungan Keuangan Daerah sebesar 1%, maka Alokasi Belanja Modal akan turun sebesar 0,222% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
4. Koefisien Efektivitas PAD sebesar 0,026 menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan variabel Efektivitas PAD sebesar 1%, maka Alokasi Belanja Modal akan naik sebesar 0,026% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
5. Koefisien EfkBM sebesar 0,075 menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan variabel Efektivitas Belanja Modal sebesar 1%, maka Alokasi Belanja Modal akan naik sebesar 0,075% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
6. Koefisien Efisiensi sebesar -0,087 menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan variabel Efisiensi sebesar 1%, maka Alokasi Belanja Modal akan turun sebesar 0,087% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
7. Koefisien KsB sebesar 0,432 menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan variabel Keserasian Belanja sebesar 1%, maka Alokasi Belanja Modal akan naik sebesar 0,432% dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis 1 (H_1) dengan analisis regresi sederhana Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, maka hipotesis diterima.
2. Pengujian Hipotesis 2 (H_2) dengan analisis regresi sederhana Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, maka hipotesis ditolak.
3. Pengujian Hipotesis 3 (H_3) dengan analisis regresi sederhana Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, maka hipotesis diterima.
4. Pengujian Hipotesis 4 (H_4) dengan analisis regresi sederhana Efektivitas Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, maka hipotesis ditolak.
5. Pengujian Hipotesis 5 (H_5) dengan analisis regresi sederhana Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, maka hipotesis diterima.
6. Pengujian Hipotesis 6 (H_6) dengan analisis regresi sederhana Keserasian Belanja berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, maka hipotesis diterima.
7. Pengujian Hipotesis 7 (H_7) dengan melakukan uji F variabel Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efektivitas Belanja Modal, Efisiensi, dan Keserasian Belanja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, maka hipotesis diterima.

5.2. Saran

Setelah melihat hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Pemerintah Daerah, agar berupaya meningkatkan kinerja keuangan daerah karena dapat memberikan dampak pada peningkatan alokasi belanja modal yang merupakan cerminan pembangunan daerah. Pemerintah juga sebaiknya lebih jeli dalam menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD, sehingga dapat tercipta keuangan daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang masih cukup besar diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sabaik-baiknya, tidak hanya untuk membiayai belanja operasional tetapi juga untuk belanja modal. Pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif yang menyusun APBD, sebaiknya lebih memperhatikan pengalokasian belanja modal di tahun-tahun yang akan datang terutama belanja modal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasaran yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 2) Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah sampel dengan memperluas periode pengamatan dan/atau memperluas objek penelitian. Penelitian selanjutnya juga bisa menambah atau mengganti variabel independen, baik berupa variabel keuangan maupun non keuangan, sehingga hasil penelitian yang diperoleh nantinya akan lebih komprehensif dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali)*. Simposium Akuntansi 9. Padang.
- Ardini dan Sri Handayani. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)*. Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. 2012. Sulawesi Utara Dalam Angka 2012.
- Bank Indonesia. 2011. Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Utara 2011: Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembangunan di Bumi Nyiur Melambai. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. *Laporan Realisasi Anggaran*. <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Akuntansi X. Makasar.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta. Bandung.
- Fees, Warren Reeve. 2008. *Pengantar Akuntansi Edisi 21*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.
- Jenie, Dyah Nirmala Arum. 2012. *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*. Semarang University Press. Semarang
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). JAAI Vol. 8, No. 2.

- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Santoso, Singgih. 2010. *Statistik Parametrik*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Setiaji, Wirawan dan Priyo Hari Adi. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada Kabupaten/Kota se-Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Simanjuntak, Gunawan. 2009. *Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Media Riset Akuntansi FEIS Universitas Bakrie. Vol. 1, No. 2. Jakarta.
- Sulistyowati, Diah. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.